

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini giat dalam melakukan berbagai macam pembangunan terutama dalam sektor perekonomian. Pemerintah mendapat peran penting untuk mendorong dan mempercepat pergerakan roda perekonomian negara. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah salah satunya dengan membuat berbagai macam kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan pengelolaan keuangan negara tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Yustika dalam Priatno (2013) Kebijakan fiskal adalah satu-satunya instrumen yang berada dalam kendali sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga mencerminkan tiga fungsi pokok pemerintah, yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Fungsi tersebut bertujuan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan pembangunan ekonomi karena tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh sektor swasta. Seperti halnya APBN, APBD juga merupakan kebijakan fiskal mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyediakan barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan belanja modal yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih,

Lusiana Damanik, 2016

*PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

Realisasi anggaran merupakan hal yang penting bagi instansi pemerintah karena menjadi salah satu tolak ukur dan gambaran mengenai kinerja suatu kementerian/lembaga pemerintah dalam satu periode. Selain menggambarkan kinerja instansi pemerintah, realisasi juga mencerminkan bagaimana suatu anggaran dapat terserap dengan optimal, efektif, dan efisien. Penyerapan anggaran dengan pemanfaatan belanja dilakukan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, untuk membiayai penyelenggaraan berbagai macam kegiatan pelayanan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, pembangunan sekolah, perbaikan jalan. Penyerapan anggaran yang optimal dan tepat sasaran akan memberi dampak dan efek yang baik pada masyarakat.

Penyerapan anggaran menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Fenomena mengenai rendahnya penyerapan anggaran sekarang menjadi sorotan publik, sampai dengan Juli 2015 terdapat 5 provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah yakni Kalimantan Utara dengan 18,6%, DKI Jakarta 19,2%, Papua 21,7%, Jawa Barat 25,5%, dan Riau 25,5%. Kelima provinsi tersebut memiliki penyerapan anggaran dibawah 30% ([http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini. 5. Provinsi. yang. Penyerapan. Anggarannya. Sangat. Rendah diakses pada tanggal 10 Oktober 2015](http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapan.Anggarannya.Sangat.Rendah diakses pada tanggal 10 Oktober 2015)).

Pada awal tahun 2016 Presiden menekankan percepatan belanja daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyikapi arahan Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga agar dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran tahun 2016. Menurut Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dengan membangun akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian, yang tertib sesuai peraturan yang berlaku, diminta kepada masing-masing pengelola anggaran untuk dapat bertindak profesional, melaksanakan tepat waktu dan memberikan *output* yang bermanfaat. (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/13998/Kemenperin-Percepat-Penyerapan-Anggaran-2016> diakses pada 17 Februari 2016). Dalam hal ini dengan menilai akuntabilitas dapat mencerminkan bagaimana penyerapan anggaran dapat terserap dengan optimal.

Lusiana Damanik, 2016

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Masalah lainnya terletak pada rendahnya penyerapan pada semester awal yang akan mengakibatkan penyerapan yang menumpuk di akhir tahun dan juga berdampak pada tidak optimalnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jika penyerapan anggaran dapat dioptimalkan merata pada setiap semesternya, maka manfaatnya juga akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Selain penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun, terdapat juga permasalahan dimana penyerapan anggaran di akhir tahun yang tidak mencapai 100%. Seperti halnya pada Kabupaten Cianjur, terdapat beberapa SKPD yang penyerapan anggaran belanja masih di bawah 90%. Penyerapan anggaran yang rendah biasanya terjadi pada belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal
Kabupaten Cianjur**

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
2010	Belanja Barang dan Jasa	Rp 220.693.166.123,00	Rp 203.404.019.496,00	Rp 7.289.146.627,00	7,83%
	Belanja Modal	Rp 289.978.690.441,00	Rp 225.832.749.280,00	Rp 64.145.941.161,00	22,12%
2011	Belanja Barang dan Jasa	Rp 389.084.964.787,00	Rp 371.530.765.020,05	Rp 17.554.199.766,95	4,51%
	Belanja Modal	Rp 280.430.142.410,00	Rp 222.509.753.340,00	Rp 57.920.389.070,00	20,65%
2012	Belanja Barang dan Jasa	Rp 336.201.135.839,58	Rp 309.511.649.331,88	Rp 26.689.486.507,70	7,94%
	Belanja Modal	Rp 381.508.941.230,00	Rp 322.640.716.696,00	Rp 58.868.224.534,00	15,43%
2013	Belanja Barang dan Jasa	Rp 374.072.249.355,36	Rp 345.487.771.261,14	Rp 28.584.478.094,22	7,64%
	Belanja Modal	Rp 376.056.704.863,00	Rp 309.901.421.702,00	Rp 66.155.283.161,00	17,59%
2014	Belanja Barang dan Jasa	Rp 532.007.158.600,62	Rp 476.959.529.820,97	Rp 55.047.628.779,65	10,35%
	Belanja Modal	Rp 516.574.943.330,35	Rp 468.287.520.155,00	Rp 48.287.423.175,35	9,35%

Sumber : Data Diolah (2015)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dengan realisasi anggaran. Selisih terbesar terjadi pada belanja modal tahun anggaran 2010 dimana selisih mencapai 22,12% dari total anggaran belanja modal yang ada, dan begitu pula pada tahun-tahun selanjutnya masih terdapat selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran. Terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran menjadikan penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

Rendahnya penyerapan anggaran menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly disebabkan oleh ketakutan Pemerintah Daerah dalam administrasi dan teknis penggunaan anggran yang belum tentu ada niat jahat mengambil uang,

Lusiana Damanik, 2016

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tapi bisa dipidanakan. (<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150825204550-12-74471/penyerapan-anggaran-rendah-akibat-ketakutan-pemda/#> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015).

Selain ketakutan pemerintah daerah, kompetensi dari aparat pemerintah daerah perlu di tingkatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah dalam dialog *Prime News Metro TV* berkaitan dengan masalah penyerapan anggaran menyebutkan bahwa di satu sisi ada kekhawatiran dan ketakutan di pemerintah daerah, disisi lain kompetensi mereka juga perlu ditingkatkan. Karena tidak semuanya SKPD memiliki kompetensi yang memadai. (<http://m.metrotvnews.com/read/2015/08/28/425374> diakses pada tanggal 20 Januari 2016). Kompetensi meliputi pengetahuan, keteampilan dan sikap kerja yang dimiliki oleh aparat pemerintah daerah akan berdampak pula pada pelaksanaan anggaran dan pelayanan pada masyarakat.

Proporsional dalam menilai penyerapan anggaran masih belum jelas tolok ukurnya. Pengamat ekonomi menyoroti bahwa masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Selain birokrasi, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya adalah faktor lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender, ketakutan menggunakan anggaran. (Muhsin dalam Halim 91:2014)

Faktor perencanaan anggaran yang lemah dan kurang matang menyebabkan rencana pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering terjadinya revisi anggaran. Revisi anggaran itu sendiri menyebabkan ketidakpastian dan tertundanya keputusan alokasi anggaran. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD dikarenakan oleh tarik ulur kepentingan. Pembahasan anggaran yang seharusnya selesai sampai dengan rincian anggaran dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, namun akibat tarik ulur kepentingan ini menjadikan kegiatan yang diusulkan tidak tepat sasaran.

Lambannya proses tender ini juga disebabkan oleh tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Beberapa peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas

Lusiana Damanik, 2016

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lagi. Aturan terkini tentang pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Proses pencairan dana dan regulasi yang cenderung rumit dan ketat menjadikan para pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen sedikit berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sikap ketakutan ini juga berakibat pada realisasi anggaran yang melambat dan mungkin juga tidak terlaksana.

Penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Priatno (2013) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini, dari 15 variabel awal diperoleh 3 faktor yakni Faktor Administrasi dan SDM, Faktor Perencanaan, dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Herriyanto (2012) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lemabaga di Wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis faktor eksploratori dan menghasilkan 5 faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta, (1) Faktor Perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia yang menjelaskan seluruh item sebesar 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47%; (5) Faktor Ganti Uang Persediaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,41%; sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor selain faktor tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri (2014) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja

Lusiana Damanik, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menghasilkan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terhadap faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, terdapat perbedaan dimana pada penelitian Herriyanto (2012) dan Priatno (2013) di sebutkan bahwa Faktor perencanaan memiliki pengaruh besar dan signifikan, sedangkan pada penelitian Putri (2014) faktor perenanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan juga terdapat pada faktor sumber daya manusia, pada penelitian Putri (2014) di sebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan, namun pada pelitian Priatno (2013) dan Herriyanto (2012) faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

Dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Faktor Perencanaan dan Faktor Sumber Daya Manusia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil tempat penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian pada SKPD di Kabupaten Cianjur karena terdapat beberapa SKPD yang penyerapan anggaran belanja di bawah 95%.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”** (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Cianjur).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?

Lusiana Damanik, 2016

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Untuk penulis, memberikan wawasan mengenai masalah perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Cianjur
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Cianjur, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan menjadi referensi pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran.
3. Untuk pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.